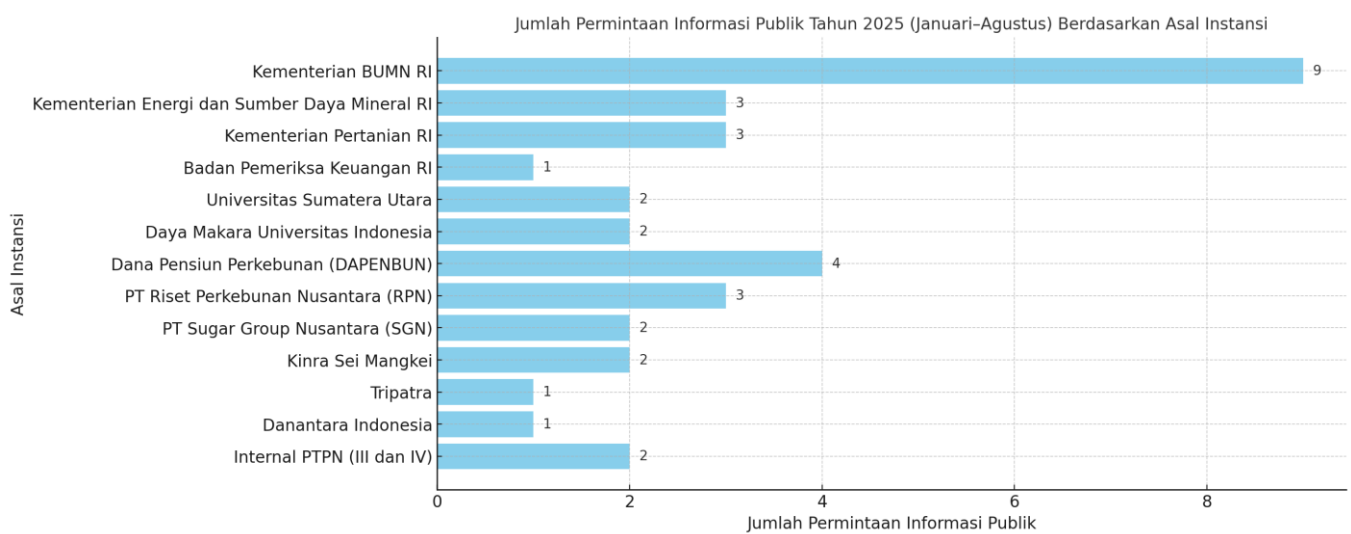


JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA Tahun 2024 dan 2025

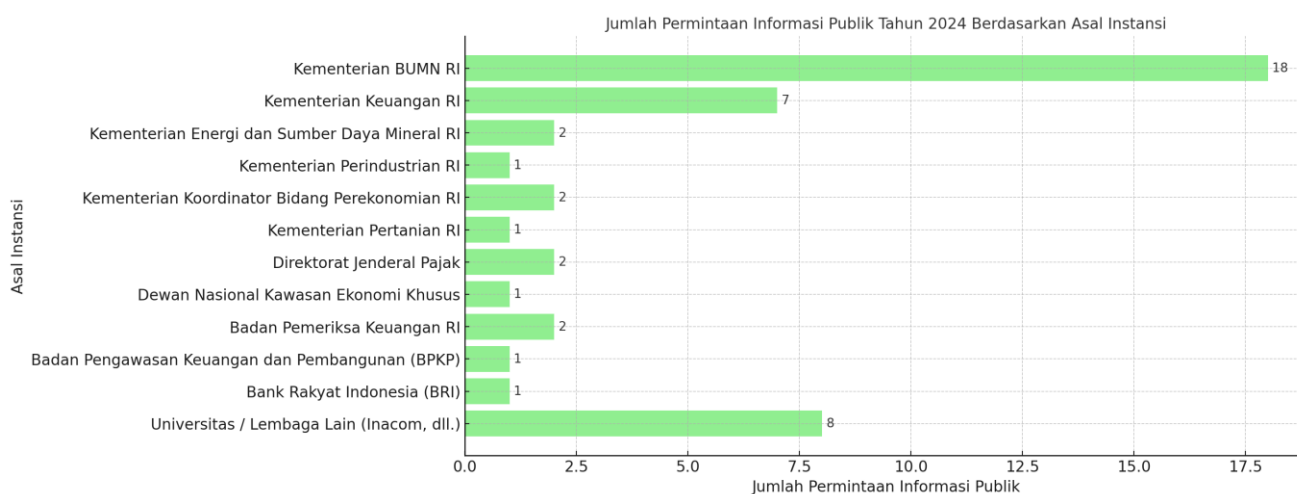
Sebagai perusahaan dengan model bisnis *Business to Business* (B2B), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berinteraksi erat dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra strategis dalam pelaksanaan program kerja serta pemenuhan mandat negara di sektor perkebunan. Pola ini menjadikan mayoritas permintaan informasi publik yang diterima PPID bersumber dari instansi pemerintah dan stakeholder kelembagaan, bukan individu masyarakat.

Grafik Permintaan Informasi melalui PPID Bulan Januari s.d Agustus 2025



Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, PPID PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menerima **36 permintaan informasi publik** yang mayoritas berasal dari stakeholder pemerintah, khususnya Kementerian BUMN RI dengan total sembilan permintaan terkait kebijakan, audit, hingga data proyek strategis. Selain itu, terdapat empat permintaan dari Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN), tiga permintaan masing-masing dari Kementerian Pertanian RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, serta PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), diikuti oleh kontribusi dari universitas, anak perusahaan, dan mitra swasta seperti Tripatra dan Danantara Indonesia. Permintaan terbanyak tercatat pada bulan Maret hingga April, didorong oleh kebutuhan data audit, evaluasi program, dan klarifikasi kebijakan lintas sektor. Dominasi permintaan dari stakeholder pemerintah menunjukkan bahwa PTPN III (Persero) memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola BUMN yang transparan, penyusunan kebijakan nasional, serta pengawasan akuntabilitas perusahaan negara.

Grafik Permintaan Informasi melalui PPID Tahun 2024



Sepanjang tahun 2024, PPID PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menerima **46 permintaan informasi publik** yang mayoritas berasal dari instansi pemerintah, dengan Kementerian BUMN RI sebagai pemohon terbanyak (18 permintaan) terkait kebijakan dan evaluasi program strategis, diikuti Kementerian Keuangan RI (7 permintaan) serta universitas dan lembaga lain seperti Inacom dan KPBN (8 permintaan). Permintaan tambahan datang dari kementerian teknis, lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP, serta satu bank BUMN yaitu BRI. Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi publik terutama dipicu oleh kepentingan pengawasan, monitoring, dan perumusan kebijakan lintas sektor, sejalan dengan karakter perusahaan yang beroperasi dalam model Business to Business (B2B).